

ASPEK-ASPEK DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

(Kabupaten Gunungkidul)

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Windy Novita Azhari

Nomor Mahasiswa : 14313407

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

ASPEK-ASPEK DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

(Kabupaten Gunungkidul)

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Windy Novita Azhari

Nomor Mahasiswa : 14313407

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2018

Penulis,



Windy Novita Azhari

PENGESAHAN SKRIPSI

Aspek-aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi

(Kabupaten Gunungkidul)

Nama : Windy Novita Azhari

Nomor Mahasiswa : 14313407

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Juli 2018

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIEDE

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL
ASPEK-ASPEK DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI (KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

Disusun Oleh : WINDY NOVITA AZHARI

Nomor Mahasiswa : 14313407

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari Senin, tanggal: 6 Agustus 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc

Penguji : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan....”

(Q.S Al Insyirah : 6)

Bunga mawar dapat tumbuh di tegarnya karang, jika kau menghendaknya.

(Darwis Tere Liye)

Ketika membuat keputusan, maka harus siap dengan konsekuensi.

(Remember When)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan kemudahan serta kelancaran yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak Rahmat dan Hidayah kepada seluruh umatnya.
2. Ibu dan Bapakkuyang tak pernah lelah memberikan semangat dan doa. Terimakasih atas doakasih sayang serta pengorbanan selama ini.
3. Simbah, Kakak dan adek-adekku.
4. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul “**Aspek-aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi (Kabupaten Gunungkidul)**” dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Strata 1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya pada:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Bapak dan Ibu, yang tidak pernah lelah memanjatkan doa, mencurahkan kasih sayang dan memberikan motivasi untuk kelancaran penelitian ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat.
3. Simbah yang selalu mendoakan lewat doa-doa khas beliau. Mbak Cyntia yang selalu meluangkan waktu menemani dan memberikan semangat. Dek Luthfi dan Avin yang selalu memberikan keceriaan.
4. Bapak Rokhedi Priyo Santoso., S.E., MIDEc selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih telah membimbing dan

memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan ilmu yang berharga dan tidak ternilai, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas IslamIndonesia.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Dyana Ulfa, Ayu Fatmala, Antiwik Wiharko, Nuranika Novalia dan Kurnaini Nurhaida yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan menemani untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Intan Tri Ashuri sahabat sesama kecil Saya, yang selalu memberikan semangat dan tawa disela-sela penyusunan skripsi.
8. Terimakasih kepada Novarli Sumanta, Hastuti dan teman-teman HMJIE yang telah memberikan pengalaman berharga.
9. Terimakasih kepada Yenny Hidayah, Andinar Febinandia dan teman-teman Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 sudah menjadi teman yang senantiasa menolong selama menempuh studi.
10. Terimakasih kepada teman-teman KKN yang sangat saya cintai.
11. Terakhir, terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dari semua pihak mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, Saya berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi saya dan pihak-pihak terkait lainnya yang

membutuhkan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.ii
PENGESAHAN UJIAN.....	iError! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 KAJIAN PUSTAKA.....	10

2.2 LANDASAN TEORI	18
A. Subsidi	18
B. Distribusi	22
C. Pupuk Bersubsidi	24
D. Istilah dan Pengertian	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengolahan Data	40
G. Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 ALUR DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI	44
4.2 6 PRINSIP TEPAT PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI	46
BAB V PENUTUP	61
5.1 KESIMPULAN	61
5.2 SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	64

LAMPIRAN.....66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Matriks SWOT	29
--------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Pupuk Bersubsidi 2018	5
Tabel 1.2 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi	6
Tabel 1.3 Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul 2018	33
Tabel 1.4 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi	34
Tabel 1.5 Informan Penelitian	39

ABSTRAK

Pupuk Bersubsidi adalah salah satu fasilitas dari pemerintah untuk sector pertanian yang diadakan untuk meningkatkan produktivitas padi demi tercapainya ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti masalah-masalah yang dihadapi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Gunungkidul.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi berlandaskan prinsip 6 tepat (tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat tempat), sedangkan data sekunder berupa peraturan-peraturan pendistribusian pupuk bersubsidi yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pendistribusian pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan tidak tercapainya prinsip 6 tepat terutama tidak tercapainya tepat jumlah, tepat harga dan tepat waktu.

Kata kunci: Pupuk Bersubsidi, Distribusi, Ketahanan Pangan, Sektor Pertanian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah dan luas wilayah yang sesuai untuk produksi pertanian, tidak heran apabila pertanian merupakan sumber mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia. Terbukti berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 dimana banyak tenaga kerja yang diserap dalam sektor pertanian ini, yaitu 24% tenaga kerja, sedangkan untuk sektor industri perdagangan menyerap 16% tenaga kerja. Sektor pertanian berkaitan erat dengan ketahanan pangan, ketahanan pangan ditunjukkan dengan keadaan terpenuhinya pangan yang cukup aman merata dan terjangkau jumlahnya bagi rumah tangga. Hal tersebut tertera berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan pada Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pangan.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan ini tidak terlepas dari keberadaan tanaman padi, maka dari itu untuk mewujudkan ketahanan pangan ini maka dituntutlah ketersediaan kebutuhan pangan, terlebih semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin tinggi pula tuntutan ketersediaan kebutuhan pangan. Dilihat dari sensus penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia tahun ini sudah berjumlah 265 juta orang, berada pada urutan ke 4 setelah Amerika, India dan China, dan diperkirakan akan menembus angka 300 juta jiwa pada tahun 2050.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3905418/jumlah-penduduk-terus-bertambah->

[bagaimana-ketahanan-pangan-ri diakses 01 April 2018](#)). Ketersediaan bahan pangan harus didukung oleh adanya sarana prasarana yang memadai sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, salah satunya yaitu subsidi pupuk. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pada tahun 2003 mulai diberlakukan fasilitas dari pemerintah berupa penyediaan pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian. Pemberlakuan fasilitas penyediaan pupuk bersubsidi ini diharapkan hasil produktivitas tani dapat meningkat yang kemudian diikuti dengan meningkatnya pendapatan petani. Dengan adanya pupuk bersubsidi dari pemerintah ini tentu tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan tetapi juga akan memberikan kesejahteraan bagi petani. Untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi ini maka pada tahun 2018 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, telah diamanatkan Program Pengelolaan Subsidi Pupuk.

Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen yang terdiri dari jenis Pupuk UREA, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Produsen yang memproduksi pupuk organik dan anorganik bersubsidi untuk kebutuhan nasional, yaitu: PT. Pupuk Sriwijaya (Pusri), PT. Pupuk Kaltim (PKT), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Pupuk Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT. Pupuk Kujang (PK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 2 Pertanian Tahun Anggaran 2015, yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani/kelompok dan diberikan pengawasan. Sebagai barang dalam pengawasan, pupuk bersubsidi diatur oleh beberapa peraturan baik melalui peraturan presiden maupun melalui peraturan menteri. Diantaranya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Serta diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

PT Pupuk Indonesia adalah Pelaksana Subsidi Pupuk yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan pengecer sesuai pembagian wilayah tanggung jawab masing-masing agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan fleksibel, efektif dan efisien. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk sesuai wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer resmi, yang kemudian akan disalurkan oleh pengecer resmi kepada petani/kelompok tani yang berada di wilayah kerjanya. Produsen, distributor dan pengecer wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Penyaluran distribusi pupuk pada tahun 2014 mulai diberlakukan mekanisme baru yaitu dengan dibentuknya tim verifikasi dan validasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Nomor: 18.1/Kpts/SR.130/B/KPA/01/2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014. Demi terjaminnya penyaluran pupuk bersubsidi yang optimal dan tepat sasaran maka pada tahun 2017 berdasarkan rekomendasi dari Litbang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan uji coba penebusan pupuk bersubsidi oleh petani ke pengecer resmi melalui Kartu Tani. Uji coba penebusan pupuk ini telah dilakukan di lima provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DIY. Yang kemudian akan dilakukan uji coba pada 10 provinsi lain di Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa jumlah kebutuhan pupuk yang tertera di RDKK berbeda dengan alokasi pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam melakukan pembayaran kepada produsen. Oleh karena itu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi maka penyaluran pupuk harus dilakukan secara proporsional sesuai RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani didampingi penyuluh pendamping dan alokasi yang telah disediakan. Selain itu penggunaan pupuk bersubsidi juga harus didampingi dengan penerapan pupuk berimbang (organik dan anorganik) sehingga pengalokasian pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara optimal. Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada tahun anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian pada tahun
anggaran 2018**

JENIS PUPUK	ALOKASI (TON)
UREA	4,100,100
SP 36	850,000
ZA	1,050,000
NPK	2,550,000
ORGANIK	1,000,000
JUMLAH	9,550,000

*Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian*

Pengalokasian pupuk bersubsidi diatas dapat berubah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain pengalokasian yang harus sesuai antara RDKK dan alokasi yang disediakan, penjualan pupuk bersubsidi dari pengecer resmi (Lini IV) ke petani/kelompok tani harus sesuai dengan HET yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018).

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 yaitu:

Tabel 1.2
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)
UREA	1.800	90.000 (@50 Kg)
SP36	2.000	100.000 (@50 Kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 Kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000 (@40 Kg)

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kementerian Pertanian

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi diatas berlaku untuk pembelian pupuk tiap kemasan secara tunai di kios pengecer resmi di lini IV, dimana kemasan pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015.

Pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen hingga konsumen/petani harus sesuai dengan enam prinsip tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu. Panjangnya alur distribusi pupuk bersubsidi menyebabkan rentan terjadinya penyimpangan seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Kelangkaan pupuk yang dialami oleh petani/kelompok tani selama beberapa tahun terakhir dikarenakan tidak sesuai jumlah kebutuhan pupuk

bersubsidi antara yang tertera di RDKK dan alokasi pemerintah. Salah satu tindakan penyimpangan yang terjadi yaitu harga pupuk yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), contohnya pemerintah telah menetapkan satu harga dari produsen hingga konsumen untuk harga pupuk Urea per karung ukuran 50kg yaitu Rp 90.000,- namun oleh pihak pengecer/kios menjual dengan harga Rp 125.000,- dengan selisih harga untuk biaya transportasi. Selain penyimpangan harga pupuk bersubsidi, tidak sesuainya jumlah pupuk permintaan kelompok tani dengan alokasi dari pemerintah juga menyebabkan petani kesulitan mencari pupuk tambahan yang memberikan celah pada pelaku-pelaku distribusi pupuk untuk melakukan penyimpangan seperti menjual pupuk diluar rayon mereka. Keadaan seperti ini harus ditindaklanjuti agar tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Gunungkidul melalui pengawasan optimal yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Berdasarkan beberapa fakta yang ditemukan dalam distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan KP3 belum optimal sehingga menyebabkan penyimpangan-penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi yang berujung pada meruginya petani.

Permasalahan yang menghambat pendistribusian kebutuhan pupuk bersubsidi ini akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi petani/kelompok tani sehingga berimbas pada menurunnya produktivitas hasil tani dan menurunnya pendapatan petani. Selain berdampak bagi kehidupan para petani, pendistribusian pupuk bersubsidi yang belum optimal

ini akan berdampak pada tidak tercapainya ketersediaan enam prinsip tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu. Dengan berbagai permasalahan dan dampak yang diakibatkan dari pendistribusi pupuk bersubsidi di Gunungkidul, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Aspek-aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Gunungkidul.”*

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana alur distribusi pupuk bersubsidi dari produsen hingga petani/kelompok tani di Kabupaten Gunungkidul?
- b. Apa sajakah kendala dalam distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis alur distribusi dari produsen hingga petani/kelompok tani di Kabupaten Gunungkidul?
- b. Untuk mengetahui kendala pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen hingga petani/kelompok tani di Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dapat menambah pengetahuan dalam hal efektivitas distribusi pupuk bersubsidi kepada petani dilihat dari apa yang terjadi pada pelaksanaannya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintahan serta sebagai bahan masukan bagi Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan pengawasan terhadap distribusi Pupuk bersubsidi supaya dapat berjalan fleksibel, efisien dan efektif sesuai dengan enam prinsip yang ditetapkan, serta bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam distribusi pupuk bersubsidi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan acuan kajian pustaka dalam melakukan penelitian melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Selain itu peneliti mengambil referensi dan literatur dari penelitian sebelumnya yang serupa, yaitu:

Dalam *Journal of Indonesian Applied Economics*, penelitian dilakukan oleh M. Umar Burhan, Agus Suman dan M. Pudjiharjo Noer Soetjipto (2011) tentang Ekonomi Terhadap Struktur, Perilaku, Dan Kinerja Pasar Pupuk Di Jawa (Kasus di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Ngawi) yang bertujuan untuk menganalisis struktur pasar dari pupuk bersubsidi di Jawa Timur, menganalisis kebutuhan pupuk subsidi yang dibutuhkan oleh petani di lahan mereka, dan mengobservasi penyimpangan dalam pendistribusi pupuk bersubsidi. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Penentuan lokasi yaitu di dua Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Lumajang, yang dilakukan dengan sengaja (purpose). Metode yang digunakan yaitu Pendekatan *Structure, Conduct, dan Performance Markets (SCP)* dan metode analisis deskriptif, dimana pendekatan *SCP* adalah model yang diasumsikan mempunyai hubungan interdependensi atau simultan diantara perilaku pasar, kinerja pasar dan struktur pasar. Hasil dari penelitian

ini ditemukan bahwa dalam struktur pasar masih terdapat ketidakadilan distribusi informasi yang diterima antar lembaga pemasaran, perilaku yang sedikit menyimpang pun ditemukan dalam perilaku pasar, baik dari segi jumlah maupun harga pupuk sejalan dengan teori rent-seeking yang didukung oleh perilaku monopoli, dan dalam kinerja pasar telah terjadi peningkatan harga pupuk bersubsidi di atas HET. Kebutuhan petani yang besar membuat petani harus membeli pupuk bersubsidi di atas HET.

Dalam Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, penelitian dilakukan oleh Watiha (2012) tentang Analisis Saluran Distribusi Dan Efisiensi Pemasaran Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas yang bertujuan untuk mengetahui proses distribusi pupuk bersubsidi dari PT Pusri dan PT Petrokimia Gresik sampai ke petani padi dan mengetahui besar margin pemasaran, price spread dan share margin yang diterima setiap lembaga penyalur pupuk bersubsidi. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan responden dimana sampel petani menggunakan metode *simple random sampling* sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui BPS, Dinas Peranian, PT Pusri, PD Harapan Pajar yang kemudian dianalisis data dengan menghitung margin pemasaran, *price spread*, *share margin*, efektivitas pemasaran dan analisis deskriptif. Hasil yang didapatkan yaitu ditemukannya pengecer binaan (pengecer tidak resmi) diantara pengecer resmi dan petani dimana pengecer binaan dapat dengan mudah memainkan harga pupuk bersubsidi. Selain itu ditemukan bahwa lembaga penyalur pupuk bersubsidi distributor dan pengecer

resmi merupakan lembaga penyalur yang tidak efisien dikarenakan memiliki margin pemasaran yang lebih besar dari pengecer binaan.

Dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), penelitian serupa juga dilakukan oleh Meliana Ayu Safitri, Bambang Supriyono dan Heru Ribawanto (2013) tentang Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa di Sumberpucung Kabupaten Malang) yang memiliki tujuan untuk mengetahui proses pendistribusian pupuk subsidi agar sistem pendistribusian yang sudah ada dapat menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk serta ketersediaan pupuk di kalangan petani. Data yang digunakan yaitu data primer yang kemudian diolah menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu diketahuinya agen resmi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yaitu produsen, distributor, pengecer dan kelompok tani. Selain itu ditemukan hasil bahwa dalam pendistribusian pupuk bersubsidi terdapat kendala yang dihadapi seperti kondisi ketidaktepatan pemenuhan pupuk sehingga timbul terjadinya kelangkaan pupuk juga masih lemahnya fungsi pengawasan yang terjadi dalam pendistribusian pupuk dikarenakan belum ada tindakan yang nyata berupa sanksi terhadap penyelewengan seperti pengecer lain mensupply wilayah lain yang bukan wilayahnya.

Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember, penelitian serupa dilakukan oleh Kaharudin Syah, Inti Wasiati, dan M.Hadi Makmur (2015) tentang Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan

distribusi pupuk bersubsidi dari Lini I hingga Lini IV dan menganalisis faktor penghambat proses penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis dengan metode analisis interaktif. Hasil yang diperoleh yaitu penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Anjung belum berjalan dengan baik dikarenakan aktor-aktor yang terlibat dalam kerap kali melakukan kecurangan seperti pembelian pupuk bersubsidi di pengecer wilayah lain, kurangnya kepercayaan dari petani terhadap kelompok tani hal ini disebabkan bahwa adanya otorisasi dalam pengambilan kebijakan dan tidak melibatkan anggota dalam pengambilan kebijakan dan masih adanya petani dalam pemberian pupuk bersubsidi pada saat musim tanam tidak sesuai dengan anjuran pupuk berimbang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga data RDKK yang diberikan masih berdasarkan hitung-hitungan dari budaya cara tanam keluarga serta kenyataan bahwa distributor hanya fokus pada penjualan sehingga dari penjualan tersebut distributor dapat mengambil keuntungan.

Dalam Jurnal Agrosains dan Teknologi, penelitian lain dilakukan oleh Sularno, Bambang Irawan, dan Nida Handayani (2016) tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Karawang Jawa Barat yang bertujuan untuk mengetahui model pengadaan dan pendistribusian pupuk subsidi yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, sedangkan teknik penentuan informan ditentukan secara *Purposif* dan *Snow Ball*. Hasil yang diperoleh yaitu masih banyak

terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi di tingkat pengecer, distributor dan lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan pupuk bersubsidi.

Dalam Jurnal Agribisnis Kerakyatan, dilakukan penelitian oleh Widya Fitriana (2008) tentang Analisis Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Sumatera Barat (Studi kasus : PT Pupuk Sriwijaya Cabang Sumbar) yang bertujuan untuk menganalisis sistem distribusi pupukbersubsidi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Sumbar. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, pemilihan responden dilakukan dilakukan secara sengaja (purposive). Metode yang digunakan yaitu dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis margin pemasaran/ distribusi dan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sistem distribusi yang paling efisien terjadi pada wilayah PPK Pasaman dengan rasio keuntungan distribusi yang paling kecil dibandingkan keempat wilayah PPK lainnya yaitu sebesar Rp 2.32 dan ditemukannya permasalahan yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi antara lain besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan, pendistribusian pupuk yang belum sesuai dengan prinsip 6T terutama belum tepat waktu, tepat jumlah dan tepat harga serta adanya biaya penyusutan akibat proses bongkat muat pupuk saat distribusi pupuk berlangsung.

Tiananda Rusydiana dan Dwi Retnoningsih (2016) juga melakukan penelitian tentang Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Ampeldento, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang). Data yang

digunakan yaitu data primer dan sekunder, data primer dalam Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ampeldento Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan cara mengambil salah satu sampel lokasi promosi pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik di Kabupaten Malang. Metode Penentuan Sampel Teknik pengambilan sampel petani pada penelitian ini menggunakan *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif untuk membandingkan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Ampeldento dengan penelitian terdahulu dan aturan distribusi yang ditetapkan dalam Permendag RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 dan penghitungan melalui analisis efektivitas. Hasil yang didapatkan yaitu pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi Desa Ampeldento belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Permendag Republik Indonesia No.15/M-DAG/PER/4/2013, dikarenakan harga pupuk yang dibeli petani lebih besar dari Harga Eceran Tertinggi (HET) selain itu berdasarkan survey lapangan total petani yang mengatakan bahwa pendistribusian pupuk bersubsidi telah sesuai prinsip 6 tepat sebesar 251,40% yang berarti efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi Desa Ampeldento belum efektif.

Penelitian sebelumnya yaitu oleh Muhammad Fadly (2013) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Petani Padi Sawah (Studi Kasus: Desa Purbaganda Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun) memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi pupuk bersubsidi dan kendala petani

dalam memperoleh subsidi pupuk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari pengambilan sampel secara acak dengan pertimbangan daerah pengguna pupuk terbesar di Sumatera Utara dan data sekunder yang diperoleh dari dinas seperti Kantor Kepala Desa Purbaganda dan Desa Wonorejo, Kelompok Tani, dan PPL. Data tersebut dianalisis dengan analisis X^2 (Chi Kuadrat). Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi pupuk bersubsidi yaitu harga dan kebijakan waktu penyaluran pupuk. Sedangkan faktor yang jadi kendala dalam kelancaran distribusi pupuk yaitu harga, kebijakan waktu penyaluran pupuk, modal petani, dan kurang optimalnya penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) oleh petani.

Penelitian lain juga dilakukan oleh F Chandrawati (2014) dengan menganalisis Pengaruh Efektivitas Subsidi Pupuk Terhadap Produksi Padi Di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan subsidi pupuk berdasarkan dua indikator keberhasilan subsidi pupuk di Kabupaten Kendal dan mengetahui pengaruh efektivitas kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi padi di Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu dengan metode deskriptif analitis dengan teknik survey. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Multistage Cluster Random Sampling* atau pengambilan sampel gugus bertahap. Data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan pencatatan. Sedangkan untuk data sekunder digunakan model

OLS yang diketahui menunjukkan adanya penyakit heteroskedastisitas kemudian diperbaiki dengan Model *Mult*, *Varlin*, dan *Stdlin*. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas subsidi pupuk dan pengaruh subsidi pupuk terhadap produksi padi di Kabupaten Kendal dapat ditarik kesimpulan kebijakan subsidi pupuk di Kabupaten Kendal belum berjalan efektif dikarenakan penyaluran subsidi pupuk sampai ke tangan petani masih mengalami beberapa kekeliruan seperti harga yang tidak tepat dan penggunaan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai anjuran pemupukan berimbang. Selain itu juga dikarenakan adanya beberapa faktor produksi seperti tenaga kerja yang kurang efektif dan luas lahan serta penggunaan pupuk yang juga berpengaruh terhadap hasil produksi di Kabupaten Kendal.

Penelitian sebelumnya yang juga meneliti hal serupa yaitu Wahyu Ardiyanto (2013) tentang Kajian Pupuk Bersubsidi Di Pekalongan (Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi) yang bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, metode pengambilan sampel yaitu dengan pengambilan teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini yaitu belum efektifnya penetapan harga karena petani yang membeli pupuk bersubsidi di agen-agen masih tidak sesuai dengan HET.

Penelitian lain Rikki Andri Anto (2011) tentang Analisis Perbedaan Harga Pembelian Dan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Karo memiliki tujuan untuk mengetahui apakah harga jual pupuk bersubsidi tingkat pengecer sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan hal-hal yang

mempengaruhi kenaikan harga pembelian pupuk bersubsidi di Kabupaten Karo. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari wawancara responden yang daerahnya dipilih secara sengaja sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga terkait seperti Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Karo. Yang kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif berdasarkan survey di lapangan. Hasil yang didapatkan yaitu tidak sesuai harga pupuk bersubsidi tingkat pengecer dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah, namun ditemukan harga yang melebihi HET dengan kenaikan harga rata-rata berkisar antara 12 % hingga 20,86 %. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan harga pembelian pupuk bersubsidi yaitu pemasaran pupuk bersubsidi di tingkat pedagang pengecer di daerah penelitian biaya sewa gudang, biaya transportasi, biaya pajak SIUD, penyusutan timbangan, biaya plastik dan goni.

2.2 LANDASAN TEORI

A. Subsidi

1. Pengertian Subsidi

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah atas barang atau jasa kepada produsen dan distributor pada suatu program

tertentu. Berikut ini pengertian subsidi yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

Subsidi (*money transfer*) menurut Suparmoko (2000) merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang dapat diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan pihak penerima subsidi. Ketika konsumen membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang lebih rendah, maka pajak negatif ini akan menambah tingkat pendapatan *rill*. Menurut Nazir (2004) subsidi adalah suatu cadangan keuangan dan sumber-sumber daya lainnya yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan usaha atau kegiatan perorangan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Hassanudin (2004) subsidi dapat mendorong peningkatan output produk-produk yang dibantu namun akan mengganggu proses alokasi sumber daya domestik secara umum dan memberi dampak yang merugikan terhadap perdagangan internasional. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa subsidi merupakan pembayaran suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan *output*. Dalam penelitian ini subsidi yang diberikan pemerintah dalam sektor pertanian kepada petani yaitu berupa pupuk yang berguna untuk meningkatkan *output*, khususnya peningkatan produktivitas hasil tani dan kesejahteraan petani.

2. Tujuan Subsidi

Pemerintah harus bijak dalam memberikan kebijakan agar subsidi yang dikeluarkan pemerintah dapat bermanfaat dan tepat sasaran sesuai tujuan pengadaannya. Menurut Nazir dan Hassanuddin (2004), terdapat beberapa tujuan subsidi, yaitu:

a. Subsidi produksi

Subsidi produksi diberikan kepada para produsen oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan output dari produk tertentu yang tujuannya untuk memperluas produksi beberapa produk dengan harga rendah yang dianggap penting.

b. Subsidi ekspor

Subsidi ekspor diberikan kepada produk-produk tertentu yang diekspor atau produk yang diekspor secara umum, sebagai suatu alat untuk membantu neraca pembayaran negara. Selain itu subsidi ekspor dilakukan untuk upaya peningkatan perdagangan.

c. Subsidi pekerjaan

Subsidi pekerjaan diberikan kepada upah oleh pemerintah sebagai suatu insentif pada perusahaan-perusahaan untuk dapat lebih banyak lagi kesempatan kerja. Sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran dalam perekonomian.

d. Subsidi pendapatan

Subsidi pendapatan dilakukan pemerintah kepada masyarakat melalui system transfer dalam usaha untuk memungkinkan mereka

menikmati standar hidup minimum. Subsidi pendapatan dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin terjamin, sehingga perekonomian diharapkan dapat lebih lanjut.

3. Jenis-Jenis Subsidi

Menurut Munawar (2013), dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), belanja subsidi terdiri atas subsidi energi dan subsidi non energy yang masing-masing terdiri:

a. Subsidi Energi:

- 1) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM);
- 2) Subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN);
- 3) Subsidi LPG tabung 3 Kg
- 4) Subsidi LGV
- 5) Subsidi Listrik

b. Subsidi Non-energi;

- 1) Subsidi Pertanian : Pangan, benih, pupuk
- 2) Subsidi bunga kredit program
- 3) *Public Service Obligation (PSO)*
- 4) Subsidi Pajak/DTP
- 5) Subsidi Lainnya

Berdasarkan jenis-jenis subsidi diatas, maka dapat diketahui bahwa pupuk termasuk dalam Subsidi Non-energi sektor pertanian.

B. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi merupakan aspek yang sangat penting untuk melancarkan kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Menurut Winardi (2005), distribusi adalah sekumpulan perantara dalam penyaluran produk-produk kepada konsumen (pembeli) yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Kotler (2007), distribusi adalah sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran barang atau jasa siap untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen (pembeli). Jadi distribusi merupakan suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar diperoleh barang yang sesuai keinginan dapat tersedia tepat pada waktunya.

2. Saluran Distribusi

Kotler (2007), saluran distribusi yaitu proses yang menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan dan dikonsumsi dimana dalam proses tersebut saling tergantung dan terlibat. Menurut Winardi (2005), yang dimaksud dengan saluran distribusi yaitu suatu kumpulan perantara penyalur produk-produk kepada pembeli yang memiliki

hubungan erat satu sama lain. Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu: agen-agen perantara dan pedagang perantara. Perbedaan dari agen-agen perantara dan pedagang perantara terletak pada proses negosiasi dalam pemindahan produk yang disalurkan dan aspek kepemilikan.

a. Agen Perantara

Agen perantara (*middleman agent*) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu:

1) Agen Penunjang:

- a) Agen pembelian dan Penjualan;
- b) Agen pengangkutan;
- c) Agen penyimpanan;

2) Agen Pelengkap;

- a) Agen yang membantu dalam bidang *financial*;
- b) Agen yang membantu dalam bidang keputusan;
- c) Agen yang dapat memberikan informasi;
- d) Agen khusus.

b. Pedagang perantara

Pedagang perantara (*merchant middleman*) ini bertanggungjawab terhadap pemilikan semua barang yang barang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Terdapat dua kelompok yang termasuk kedalam pedagang perantara, yaitu: pengecer dan pedagang barang besar.

C. Pupuk Bersubsidi

1. Pengertian Pupuk Bersubsidi

Menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 yang dimaksud dengan pupuk subsidi yaitu barang yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyaluran mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Jadi yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi

merupakan pupuk yang pengadaannya mendapatkan potongan biaya dari pemerintah dengan mekanisme pengawasan tertentu yang ditujukan bagi petani di sektor pertanian terdiri atas jenis Pupuk Urea, SP-36,ZA, NPK dan Pupuk Organik.

2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Menurut Sudjono (2011), sistem distribusi dapat diartikan sebagai rangkaian mata rantai penghubung antara produsen dengan konsumen dalam rangka menyalurkan produk atau jasa agar sampai ke tangan konsumen secara efisien dan mudah dijangkau. Menurut Sudjono (2011), distribusi pupuk bersubsidi pada awalnya menggunakan suatu sistem yang dikendalikan melalui campur tangan pemerintah secara langsung (*fully regulated*) terutama pada periode (1979- 1998) untuk menunjang program swasembada pangan. Memasuki era reformasi 1998, mekanisme penyaluran pupuk diserahkan kepada pasar bebas dimana pemerintah sempat mencabut program subsidi pupuk pada periode 1998-2002. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Pelaksana Subsidi Pupuk ditugaskan pada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah kerja tanggung jawab masing-masing.

Pengaturan pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk beraubsidi antar produsen dilakukan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan tujuan agar dapat lebih efisien, efektif dan fleksibel. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada lini III dilakukan melalui produsen kepada distributor resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya pada penyalur lini IV dilakukan oleh distributor kemudian menyalurkan kepada Pengecer resmi yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Untuk petani/kelompok tani, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan sistem tertutup melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

3. Modus-Modus Penyimpangan Pupuk Bersubsidi

Menurut Sudjono (2011), kurangnya produksi bukanlah penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi namun lebih dikarenakan lemahnya sistem distribusi. Tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah lain seperti penyaluran, penyimpanan, dan pemasaran pupuk bersubsidi umumnya berpangkal pada sistem distribusi yang belum terkoordinasi dengan efektif. Penyimpangan-penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut membuktikan adanya kelemahan dalam sistem distribusi. Menurut Sudjono (2011), modus-modus yang kerap terjadi

dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yaitu: penyelundupan pupuk ke luar negeri, penggantian pupuk bersubsidi menjadi pupuk non subsidi, harga pupuk bersubsidi yang melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi), penjualan diluar wilayah kerja masing-masing lini. Pada dasarnya modus dalam penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi selalu bergerak dinamis, seperti yang terjadi pada saat ini modus-modus penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi adalah penggantian karung, melakukan pengurangan timbangan pupuk, mencampur pupuk bersubsidi dengan zat lain. Dengan adanya pengawasan yang efektif pada setiap lini diharapkan dapat mengurangi modus-modus penyimpangan pupuk bersubsidi.

D. Istilah dan Pengertian

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani/kelompok tani di sektor pertanian.
2. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota

kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.

4. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan / atau peternakan.
5. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Penyalur adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan petani/kelompok tani sebagai konsumen akhir.
7. eRDKK adalah bentuk lain dari RDKK yang berupa web base dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kepegawaian.
8. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi antar instansi terkait yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota dalam pengawasan pupuk dan pestisida .
9. Direktur Jenderal mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan, Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.
10. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT

Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik.

11. Distributor memiliki kewajiban untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya. Distributor dapat berbentuk perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).
12. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau Desa, dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada petani/kelompok tani di wilayah kerja tanggungjawabnya. Pengecer ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).
13. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu ataupun sub sektor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian sosial merupakan sebuah upaya menelaah dan memecahkan permasalahan sosial yang ada melalui sebuah pemikiran yang mendalam terhadap suatu variabel-variabel yang dikaji. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka harus menggunakan metode tertentu yang tepat. Selain itu dalam melakukan penelitian, objek yang diteliti harus dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat menggunakan sebuah metode. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004), penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Sedangkan menurut Moh. Nazir (1988) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk menjelaskan secara factual mengenai fakta-fakta serta permasalahan yang terjadi sesungguhnya didapat dari penelitian Aspek-aspek Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Gunungkidul.

Menurut Usman dan Akbar (2004), metode kualitatif ini lebih mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dengan berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa berhubungan dengan tingkah laku manusia pada situasi tertentu. Dengan digunakannya tipe deskriptif kualitatif maka diharapkan dapat digunakan sebagai alat analisis dalam upaya mencari solusi dalam permasalahan distribusi pupuk bersubsidi.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian diperlukan pembatasan terhadap suatu masalah yang diangkat. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan penelitian agar dapat memperoleh gambaran yang jelas kapan penelitian tersebut dianggap selesai. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan menurut Moleong (2007). Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dilihat bahwa fokus penelitian sangatlah penting, sehingga dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah aspek-aspek distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul.

Ketersediaan pupuk bersubsidi sangat diperlukan demi mendukung ketahanan pangan nasional, untuk itu penyediaan pupuk bersubsidi harus memenuhi 6 prinsip tepat yaitu :

1. Tepat Jumlah

Memenuhi alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai PERMENTAN NO.47/ Permentan/SR.310 /12/2017 dari produksi

produsen. Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 sebesar 20.904 ton.

Tabel 1.3**Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul 2018**

NO	KECAMATAN	UREA	NPK	SP-36	ZA	ORGANIK
1.	PANGGANG	444,00	145,00	18,00	23,00	2,00
2.	PURWOSARI	319,00	138,00	33,00	40,00	38,00
3.	PALIYAN	626,00	311,00	22,00	27,00	13,00
4.	SAPTOSARI	731,00	182,00	2,00	2,00	2,00
5.	TEPUS	718,00	146,00	27,00	1,00	3,00
6.	TANJUNGSARI	608,00	151,00	14,00	7,00	13,00
7.	RONGKOP	618,00	170,00	57,00	-	2,00
8.	GIRISUBO	567,00	153,00	71,00	4,00	3,00
9.	SEMANU	756,00	494,00	61,00	35,00	41,00
10.	PONJONG	1.016,00	576,00	94,00	51,00	25,00
11.	KARANGMOJO	650,00	483,00	79,00	170,00	294,00
12.	WONOSARI	636,00	554,00	89,00	154,00	23,00
13.	PLAYEN	647,00	442,00	23,00	53,00	262,00
14.	PATUK	431,00	387,00	32,00	157,00	63,00
15.	GEDANGSARI	600,00	265,00	61,00	88,00	15,00
16.	NGLIPAR	725,00	334,00	72,00	67,00	160,00
17.	NGAWEN	808,00	415,00	55,00	131,00	62,00
18.	SEMIN	1.030,00	419,00	97,00	199,00	72,00
JUMLAH		11.930,00	5.765,00	907,00	1.209,00	1.093,00

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul

2. Tepat Tempat

Pendistribusian pupuk bersubsidi dari distributor hingga petani/kelompok tani harus sesuai dengan daerah tempat tinggal.

3. Tepat Jenis

Pendistribusian pupuk ke wilayah kerja masing-masing sesuai dengan jenis pupuk yang telah ditetapkan dalam PERMENTAN NO.47/Permentan/SR.310/12/2017. Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP 36, ZA, NPK, dan Organik.

4. Tepat Harga

Menetapkan harga jual Produsen hingga Petani yang mengacu pada tidak terlampauinya Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 yaitu:

Tabel 1.4

Harga Eceran Tertinggi (HET)

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)
UREA	1.800	90.000 (@50 Kg)
SP36	2.000	100.000 (@50 Kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 Kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000 (@40 Kg)

*Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian*

5. Tepat Mutu

Sesuaiinya mutu pupuk bersubsidi antara kandungan pada pupuk dengan label yang tertera pada kemasan.

6. Tepat Waktu

Ketersediaan pupuk bersubsidi sebelum masa tanam, sehingga petani tidak perlu menunggu terlalu lama.

Dalam penelitian ini penulis berupaya menganalisis masalah-masalah yang ditemui dalam distribusi pupuk bersubsidi melalui evaluasi prinsip 6 tepat yang kemudian dituangkan dalam:

1. Alur-alur distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul
2. Evaluasi 6 Tepat oleh aktor-aktor dalam pendistribusian pupuk bersubsidi
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul

C. Lokasi Penelitian

Penentuan Lokasi adalah cara terbaik untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan, menurut Moleong (2007). Sementara itu, faktor geografis dan praktis seperti biaya, tenaga dan waktu perlu dipertimbangkan

dalam menentukan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menentukan lokasi penelitian dengan sengaja, yaitu di Kabupaten Gunungkidul.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh haruslah jelas, spesifik dan mendalam. Berdasarkan pendapat dari Sugiyono (2009), bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1. Observasi

Observasi menurut Arikunto (2013) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan mata atau pengamatan. Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Jenis-jenis observasi diantaranya yaitu

observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi non partisipan, dan observasi partisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti turut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat langsung terhadap objek yang dilakukan penelitian, yaitu dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan pendistribusian subsidi pupuk di Kabupaten Gunungkidul. Observasi ini berguna untuk peneliti dalam menentukan informan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Menurut Arikunto (2013) *interview* yang sering disebut wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Secara fisik wawancara dapat dibedakan atas wawancara struktur dan wawancara tidak terstruktur. Ditinjau dari pelaksanaannya wawancara dapat dibagi menjadi wawancara bebas, wawancara terpimpin (*guided interview*), dan wawancara bebas terpimpin. Dalam penelitian ini, peneliti memilih melakukan wawancara terpimpin (*guided interview*), yang dimaksud dengan wawancara terpimpin yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci (panduan wawancara) seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur. Penggunaan alat rekam saat wawancara sangat

diperlukan agar peneliti tidak kehilangan jawaban-jawaban penting dari informan, dimana penggunaan alat rekam telah mendapatkan izin dari informan. Gambaran latar belakang dan topik peneliti harus disampaikan terjadap informan sebelum melakukan wawancara. Cara-cara yang harus dilakukan peneliti saat wawancara di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan kata yang memiliki arti ganda, taksa, atau pun yang bersifat ambiguitas sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan salah paham.
- b. Pewawancara sebaiknya tidak menanyakan pertanyaan yang panjang atau pertanyaan yg menimbulkan pertanyaan lain.
- c. Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit denganacuan waktu dan tempat yang jelas.
- d. Pewawancara sebaiknya mengajukan pertanyaan dalam rangka pengalaman responden.
- e. Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang ada atausama sekali tidak menyebutkan alternatif.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2009), merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti berupa foto, gambar, serta data-data mengenai pendistribusian pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Arikunto (2013), data primer adalah data dalam bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang, kata-kata lisan yang diucapkan dan dapat dipercaya dengan kata lain yaitu informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari para informan yang terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul, distributor pupuk bersubsidi, pengecer, serta kelompok tani/petani. Berikut informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.5

Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	KELOMPOK TANI/PETANI	2
2	PENGEKER/KIOS	2
3	DISTRIBUTOR	2
4	DINAS PERTANIAN	1
TOTAL		7

Sumber: diolah

b.Data Sekunder

Menurut Arikunto (2013), data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti foto-foto, catatan notulen rapat, sms, data, serta benda-benda lain yang dapat menambah data primer. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari Dinas Pertanian, buku-buku, media elektronik serta catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan pendistribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Gunungkidul.

F. Teknik Pengolahan Data

Menurut Moleong (2007) setelah data selesai dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan adalah:

- a. Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data, dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan.

c. Penyusunan data, yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah ditetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian disusun secara sistematis dengan memasukkan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian dilakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan dilakukan.

G. Analisis Data

Menurut Moleong (2007) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, kemudian memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif Menurut Sugiyono (2009) proses analisis data secara interaktif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh, berikut tahapan analisis data, yaitu:

1. Pengumpulan Data : pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi Data : Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ditemukan dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dibuat laporan lengkap dan terinci. Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan memfokuskan distribusi pupuk bersubsidi

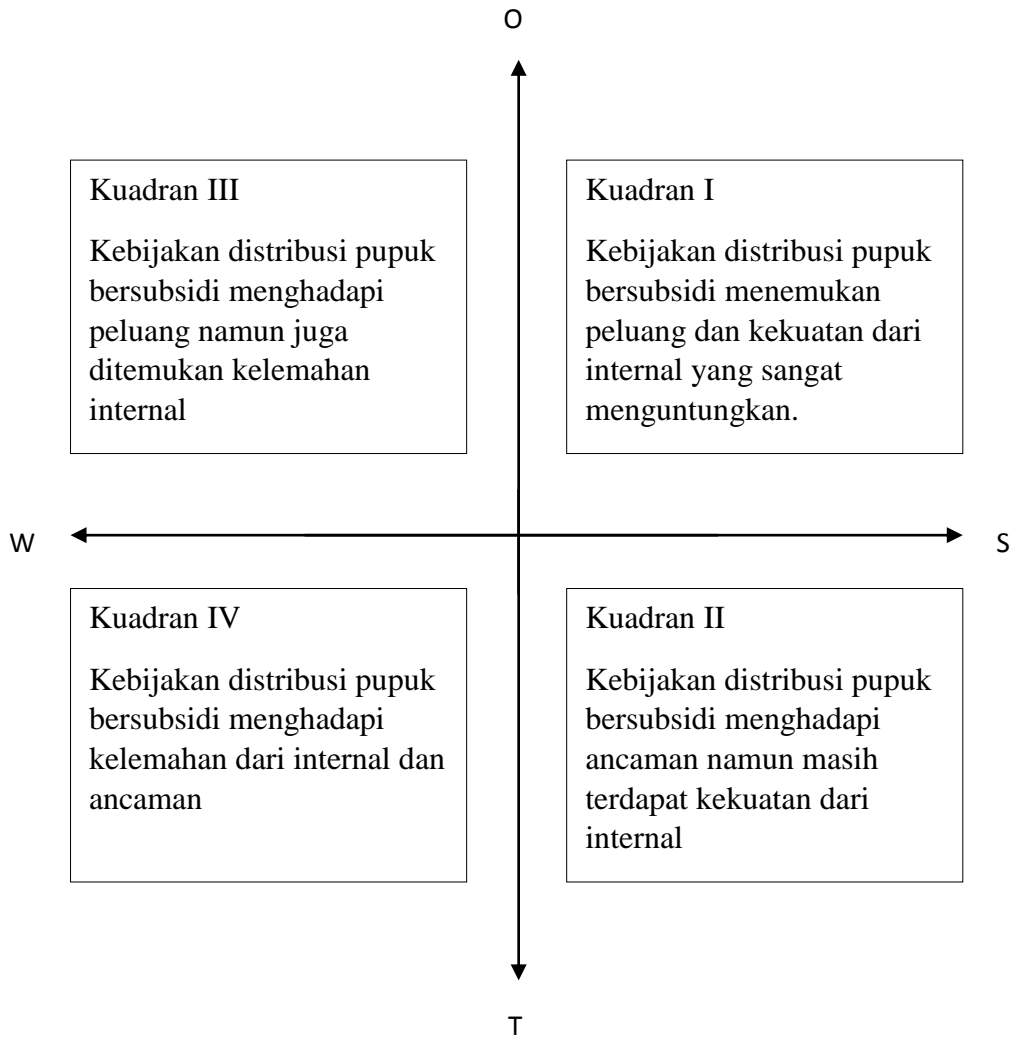
kabupaten Gunungkidul yang kemudian akan dikelompokkan berdasarkan kategorinya.

3. Penyajian Data : Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti sehingga dapat menemukan gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini, tertuang dalam bentuk deskripsi.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi : Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data dengan bukti-bukti yang valid.

Selain analisis data tersebut diatas, peneliti juga melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), analisis SWOT adalah suatu alat yang membantu menentukan sasaran secara tepat sesuai dengan keadaan lingkungan baik faktor internal (*Strengths and Weaknesses*) maupun eksternal (*Opportunities and Threats*) melalui pengamatan.

Gambar 1.1

Matriks SWOT



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 ALUR DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN

GUNUNGKIDUL

Alur pendistribusian pupuk bersubsidi yang panjang mengakibatkan rawan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan berimbas pada tidak tepatnya sasaran penyaluran subsidi, untuk itu alur distribusi pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup. Dimana Ketua Kelompok Tani menyelenggarakan musyawarah penyusunan RDKK yang dihadiri oleh anggotanya dan didampingi oleh Penyuluh Pendamping, selanjutnya RDKK Kelompok Tani akan direkap berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten Gunungkidul, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan RDKK dilakukan dengan acuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Penyusunan RDKK dilakukan satu tahun sebelum masa panen berikutnya.

Pada tahun 2014 berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2012, maka antara Dinas Pertanian dengan distributor atau pengecer dilakukan sistem Verifikasi dan Validasi oleh Tim Verifikasi secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat.

Sistem Verifikasi dan Validasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi serta menghindari adanya penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah dilakukan verifikasi dan validasi tersebut dijadikan sebagai acuan pembayaran subsidi pupuk dari pemerintah pusat kepada produsen melalui SK Menteri Pertanian dimana pada SK tersebut tertera jumlah alokasi pupuk bersubsidi. SK Menteri Pertanian kemudian diserahkan pada PT PUPUK INDONESIA untuk dilakukan produksi. Dalam hal ini produsen pupuk bersubsidi jenis Urea yaitu PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG sedangkan untuk pupuk jenis NPK, ZA, SP36 dan Organik diproduksi oleh PT PETROKIMIA GRESIK. Produksi pupuk bersubsidi kemudian disalurkan oleh produsen ke gudang Provinsi DIY, kemudian pupuk bersubsidi disalurkan ke gudang Kabupaten. Selanjutnya masing-masing distributor mengambil pupuk bersubsidi dan membawanya ke gudang distributor. Distributor pupuk bersubsidi jenis Urea yaitu CV Fai Putra Tanjungsari, KUD Mekar Rongkop, KUD Subur Semin dan PT PPI Yogyakarta sedangkan untuk pupuk jenis NPK, ZA, SP36 dan Organik disalurkan oleh PT Alam Raya Sambipitu dan CV Kaneka Tani. Pupuk bersubsidi yang sudah berada di gudang distributor kemudian akan diantarkan ke kios/pengecer yang kemudian akan ditebus oleh kelompok tani. Dalam melakukan penebusan

pupuk bersubsidi oleh Kelompok Tani, jumlah yang disalurkan perwilayah layanan ditentukan sendiri oleh masing-masing pengecer, namun dengan ketentuan tidak boleh melebihi kuota yang tertera pada Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara distributor dan pengecer.

4.2 6 PRINSIP TEPAT PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Penyaluran pupuk bersubsidi perlu dilakukan sesuai 6 prinsip tepat, yaitu : tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu dan tepat waktu. Namun dalam penyaluran pupuk bersubsidi terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan 6 prinsip tepat tersebut belum tercapai.

PETANI

1. TEPAT JUMLAH

Pada umumnya petani tidak mengetahui jumlah alokasi pupuk tiap Kecamatan, dan hanya mengetahui jumlah alokasi pupuk mereka sendiri. Sedangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang didapatkan petani tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada RDKK. Jumlah alokasi pupuk bersubsidi dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan petani, karena untuk mengantisipasi kekurangan pupuk bersubsidi petani melakukan penggunaan pupuk non subsidi dan pupuk organik yang diperoleh dari warga yang menjual pupuk organik olahan sendiri.

2. TEPAT TEMPAT

Kelompok Tani/Petani mengetahui kios/pengecer resmi yang menjadi tempat pembelian pupuk bersubsidi khusus wilayahnya dan petani tidak berkeinginan untuk membeli pupuk bersubsidi di luar wilayahnya. Pembelian pupuk bersubsidi di luar wilayahnya pernah dilakukan oleh seorang petani pada tahun 2014 dikarenakan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Berbeda dengan tahun ini, meskipun terjadi ketidaksesuaian jumlah alokasi pupuk bersubsidi dan permintaan RDKK Tani tetapi petani tidak membeli di wilayah lain dan menggantinya dengan menggunakan pupuk organik.

3. TEPAT JENIS

Jenis-jenis pupuk bersubsidi yang dibeli petani hanya Urea, ZA, SP36, NPK dan Organik. Tidak sesuai alokasi pupuk bersubsidi dengan permintaan RDKK Tani membuat petani kekurangan pupuk, hal tersebut beberapa petani pernah membeli salah satu jenis pupuk lebih banyak dari jumlah alokasi yang seharusnya ia dapatkan. Contoh : alokasi pupuk Urea Pak Edo hanya 50kg, namun Pak Edo membeli sebanyak 60kg. Pembelian pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan alokasinya ini sudah disepakati oleh kelompok tani dan pengecer.

4. TEPAT HARGA

Petani/Kelompok Tani mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing jenis pupuk bersubsidi. Petani/Kelompok Tani mengakui bahwa

kerap kali mereka mendapati harga pupuk bersubsidi melebihi HET, harga pupuk yang melebihi HET ini merupakan sebuah perjanjian antara sopir dan kelompok tani. Dimana petani/kelompok tani menginginkan pupuk bersubsidi diantarkan dari kios/pengecer sampai ke rumah kelompok tani. Hal tersebutlah yang menyebabkan harga pupuk bersubsidi melebihi HET. Harga masing-masing pupuk bersubsidi yang dibeli petani/kelompok tani yaitu :

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/ZAK)	(Rp/ZAK)
UREA	90.000 (@50 Kg)	125.000 (@50 Kg)
SP36	100.000 (@50 Kg)	135.000 (@50 Kg)
ZA	70.000 (@50 Kg)	105.000 (@50 Kg)
NPK	115.000 (@50 Kg)	150.000 (@50 Kg)
ORGANIK	20.000 (@40 Kg)	55.000 (@40 Kg)

Sumber : diolah

5. TEPAT MUTU

Petani/Kelompok Tani mengetahui perbandingan kandungan masing-masing pupuk bersubsidi untuk setiap tanaman. Petani/Kelompok Tani tidak pernah mendapati pupuk bersubsidi kadaluarsa, namun hanya kemasan yang sedikit terbuka.

6. TEPAT WAKTU

Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi untuk petani keterlambatan waktu ketersediaan pupuk bersubsidi pada masa tanam kerap kali terjadi, padahal RDKK sudah disusun satu tahun sebelum masa tanam. Waktu yang dibutuhkan dalam pennebusan pupuk bersubsidi dari petani ke pengecer yaitu sebulan sebelum masa tanam.

KIOS/PENGEKER

1. TEPAT JUMLAH

Alokasi pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia tidak sesuai dengan yang tertera pada RDKK Tani, hal ini dikarenakan kurangnya dana dari pemerintah dalam pemberian subsidi. Atas ketidaksesuaian ini maka dari pihak pemerintah memberikan perhitungan pembagian pupuk bersubsidi berdasarkan luas lahan, selain itu ditemukan bahwa ada pengecer yang menjual pupuk bersubsidi lebih dari yang tertera dalam alokasi pupuk bersubsidi. Meskipun pernah menjual pupuk bersubsidi lebih dari RDKK, namun tidak melebihi kuota pengecer misalnya Urea di wilayah pengecer Tani Makmur 250 ton maka dalam satu tahun tidak boleh lebih dari jumlah tersebut. Pada beberapa pengecer tidak mengetahui jumlah alokasi pupuk dalam satu kecamatan dan hanya mengetahui jumlah alokasi pupuk sesuai wilayah kerjanya.

2. TEPAT TEMPAT

Pengecer/kios tidak dapat menjual pupuk bersubsidi diluar wilayahnya, dikarenakan sudah ada aturan dari pemerintah bahwa tidak diperbolehkan menjual di luar wilayahnya. Pembelian pupuk bersubsidi oleh pengecer juga sesuai dengan distributor wilayah kerjanya sesuai yang diatur.

3. TEPAT JENIS

Beberapa jenis pupuk bersubsidi yang dijual oleh pengecer sesuai dengan yang peraturan pemerintah yaitu Urea, NPK, ZA, SP36 dan Organik. Dalam penjualan pupuk bersubsidi, pengecer pernah menjual pupuk Urea lebih tinggi dari yang tertera di alokasi dengan persetujuan petani. Beberapa pengecer tidak pernah menjual pupuk bersubsidi yang sudah diganti namanya atau kandungannya.

4. TEPAT HARGA

Pengecer mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk petani. Namun HET tersebut hanya berlaku sampai ke pengecer dalam artian petani mengambil sendiri ke pengecer, pada kenyataannya banyak kelompok tani meminta pupuk bersubsidi diantarkan ke lokasi kelompok tani. Hal tersebut membuat biaya pupuk bersubsidi menjadi lebih mahal dikarenakan harus memberikan tambahan uang ongkir kirim pada sopir. Harga yang diperoleh pengecer dari distributor tidak pernah melebihi harga yang sudah diatur oleh Kementrian Perdagangan yaitu :

JENIS PUPUK	HARGA DISTRIBUTOR (kg) ke PENGE CER	HARGA PENGE CER (kg) ke PETANI
UREA	Rp 1.731,818	Rp 1.800,-
NPK	Rp 1.331,818	Rp 1.400,-
ZA	Rp 1.931,818	Rp 2.000,-
SP36	Rp 2.231,818	Rp 2.300,-
ORGANIK	Rp 431,818	Rp 500,-

Sumber : diolah

5. TEPAT MUTU

Beberapa pengecer mengetahui kandungan tiap jenis pupuk bersubsidi, kandungan pupuk bersubsidi ini rutin dilakukan pengecekan oleh Dinas Pertanian. Kebutuhan pupuk bersubsidi petani yang tidak terbatas mengurangi kemungkinan terjadinya pupuk bersubsidi yang melewati batas kadaluarsa.

6. TEPAT WAKTU

Keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi kerap kali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, dikarenakan petani seluruh daerah yang menebus secara bersama padahal gudang penyimpanan terbatas. Selain itu keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi dikarenakan transportasi yang kurang memadai dan cuaca yang tidak menentu.

DISTRIBUTOR

1. TEPAT JUMLAH

CV. Fai Putra adalah salah satu distributor resmi PT PUSRI, dimana jumlah distribusi alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dari CV. Fai Putra ke pengecer wilayah kerjanya yaitu sebesar 3.364 ton (6 Kecamatan). Pembagian alokasi pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan RDKK ini diserahkan sepenuhnya terhadap pengecer. Beberapa distributor tidak pernah menjual pupuk bersubsidi melebihi yang tertera dalam alokasi pupuk bersubsidi.

2. TEPAT TEMPAT

Distributor tidak dapat menjual pupuk bersubsidi diluar wilayahnya, terlebih dengan adanya aturan ketat yang tidak diperbolehkan menjual di luar wilayahnya. Pembelian pupuk bersubsidi oleh distributor juga sesuai dengan produsen wilayah kerjanya yaitu PT PUSRI (Urea).

3. TEPAT JENIS

Distributor resmi dari produsen PT PUSRI (produsen pupuk jenis Urea) yaitu CV. Fai Putra, KUD Mekar Rongkop, KUD Subur Semin, dan PT PPI Yogyakarta. Sedangkan distributor resmi dari produsen PT PETROKIMIA GRESIK (produsen pupuk jenis NPK, ZA, SP-36 dan Organik) yaitu PT Alam Raya dan CV Kaneka Tani. Dalam penjualan pupuk bersubsidi, distributor tidak pernah menjual pupuk bersubsidi yang sudah diganti namanya atau kandungannya.

4. TEPAT HARGA

Distributor mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk petani. Harga yang diperoleh distributor dari produsen tidak pernah melebihi harga yang sudah diatur oleh dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yaitu :

JENIS PUPUK	HARGA PRODUSEN (kg) ke DISTRIBUTOR	HARGA DISTRIBUTOR (kg) ke PENGEKER
UREA	Rp 1.627,2729	Rp 1.731,818
ZA	Rp 1.222,727	Rp 1.331,818
SP-36	Rp 1.822,727	Rp 1.931,818
NPK	Rp 2.122,727	Rp 2.231,818
ORGANIK	Rp 322,727	Rp 431,818

Sumber : diolah

5. TEPAT MUTU

Distributor mengetahui kandungan tiap jenis pupuk bersubsidi melalui uji lab yang rutin dilakukan pengecekan oleh Dinas Pertanian \pm 3 bulan sekali. Dalam penjualan pupuk bersubsidi belum pernah ditemukan adanya pupuk bersubsidi yang kadaluarsa, pupuk tidak ada kadaluarsa hanya saja kemasan pupuk sering berlubang. Adanya kemasan yang berlubang ini kemudian dilaporkan kepada dinas sehingga dapat diganti.

6. TEPAT WAKTU

Keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi kerap kali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, hal ini dikarenakan pembelian ke produsen yang

bersamaan dengan distributor lain di Yogyakarta. Untuk mengurangi keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi, distributor melakukan pembelian dari produsen lebih awal sehingga pengecer dapat menebus lebih cepat juga. Penebusan pupuk bersubsidi oleh distributor membutuhkan waktu sekitar 2 hari.

DINAS PERTANIAN

1. TEPAT JUMLAH

Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul sebesar 20.904 ton, dimana menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian alokasi pupuk bersubsidi tersebut belum sesuai jumlahnya dengan jumlah kebutuhan yang tertera dalam RDKK Tani. Pembagian pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan ini kemudian dilakukan pembagian berdasarkan luas lahan dan musim tanam. Meskipun terjadi ketidaksesuaian antara alokasi pupuk bersubsidi dan RDKK Tani, namun seluruh lini I hingga IV sepaham bahwa pemerintah memang hanya menyediakan alokasi yang lebih kecil dari RDKK melalui rapat BPP.

2. TEPAT TEMPAT

Dalam penjualan atau pembelian pupuk bersubsidi Kelompok Tani, Pengecer dan Distributor tidak bisa membeli diluar wilayah kerjanya dikarenakan penggunaan sistem alur tertutup. Apabila

kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi maka kelompok petani dianjurkan untuk membeli pupuk non subsidi dan menggunakan pupuk kandang.

3. TEPAT JENIS

Sosialisasi terkait cara membedakan pupuk bersubsidi asli dan palsu sering dilakukan oleh Dinas Pertanian pada 18 kecamatan minimal 2 kali sebulan sebelum masa tanam dan setelah masa panen. Selama berlakunya pupuk bersubsidi tidak pernah ditemukan adanya label pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan yang disalurkan pemerintah.

4. TEPAT HARGA

Pembelian pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), dimana harga pupuk bersubsidi harus sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 yaitu:

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)
UREA	1.800	90.000 (@50 Kg)
SP36	2.000	100.000 (@50 Kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 Kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000 (@40 Kg)

Sumber : diolah

Pada kenyataannya harga pupuk bersubsidi di beberapa tempat ditemukan melampaui HET dikarenakan biaya transportasi antara pengecer ke petani. Meskipun begitu pemerintah tidak membenarkan adanya biaya kirim untuk petani dari pengecer.

5. TEPAT MUTU

Dinas Pertanian melakukan sosialisasi untuk mengetahui perbandingan kandungan pupuk tiap tanaman pada 18 kecamatan di rapat BPP, selain tu pengecekan rutin juga dilakukan 2-3 bulan sekali dikarenakan kurangnya anggaran untuk pengawasan. Dalam pengecekan rutin tersebut tidak pernah ditemukan pupuk bersubsidi yang melewati batas kadaluarsa dikarenakan pupuk bersubsidi selalu habis.

6. TEPAT WAKTU

Keterlambatan waktu ketersediaan pupuk bersubsidi pada saat masa tanam pernah terjadi di Kabupaten Gunungkidul, penyebabnya

yaitu petani yang menunda-nunda dalam melakukan penebusan dan transportasi pengiriman dari Palembang-Gunungkidul yang sering terjadi kendala.

4.3 KENDALA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

Dari analisis melalui prinsip 6 tepat tersebut, diketahui bahwa dalam pendistribusian pupuk bersubsidi masih terdapat beberapa kendala yang dapat menyebabkan ketidaktepatan 6 prinsip tepat tersebut. Kendala-kendala yang dialami dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yaitu :

1. Sarana dan prasarana pendistribusian pupuk bersubsidi yang kurang memadai. Contohnya transportasi pendistribusian pupuk bersubsidi dari pabrik produsen di Palembang hingga ke Gudang Provinsi DIY yang kurang memadai.
2. KP3 dirasa kurang dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Adanya harga yang melebihi HET dan ketidaktepatan waktu ini menimbulkan prasangka bahwa KP3 kurang dalam melakukan pengawasan yang dikarenakan kurangnya anggaran pengawasan dan petugas pengawas.
3. Harga pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga pupuk bersubsidi yang melebihi HET ini dikarenakan adanya penambahan biaya atau ongkos kirim dari pengecer ke petani/kelompok tani. Namun pada Kelompok Tani Ngudi Rejeki diketahui bahwa penambahan ongkos kirim ini juga untuk kas kelompok tani.

4. Penebusan pupuk bersubsidi yang ditunda-tunda atau bersamaan. Saat pupuk bersubsidi tersedia di kios/pengecer petani/kelompok tani cenderung menunda-nunda dalam melakukan penebusan dengan alasan masa tanam masih agak lama. Begitu juga dengan pengecer/kios yang mengambil pupuk bersubsidi dari distributor secara bersama-sama, sehingga distributor kekurangan stok pupuk bersubsidi.

4.4 SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

4.4.1 Faktor Internal

Faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, antara lain :

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1. Gudang distributor yang sangat memadai	1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai (transportasi)
2. Kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi	2. Pengawasan yang minim dikarenakan kurangnya petugas
3. Kios/pengecer yang mudah ditemukan	3. Penyimpangan yang masih terjadi antara kios/pengecer dengan petani/kelompok tani
4. Terjalannya koordinasi yang baik antara KP3 dan setiap lini	

Sumber : diolah

4.4.2 Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dalam kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, antara lain :

Peluang (O)	Ancaman (T)
1. Tersedianya anggaran dana yang cukup 2. Berkurangnya penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi	1. Harga pupuk bersubsidi yang melebihi HET

Sumber : diolah

4.4.3 Strategi Kebijakan

	Strength (S)	Weaknesses (W)
Opportunities (O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani/kelompok tani sebulan sebelum masa tanam. 2. Pengawasan KP3 secara berkala pada setiap lini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah petugas pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi. 2. Pengecekan transportasi pengangkut pupuk bersubsidi dari produsen hingga lini IV
Threats (T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dari Dinas Pertanian kepada petani untuk membuat pupuk organic sendiri. 2. Sosialisasi kepada petani/kelompok tani untuk menebus pupuk bersubsidi sebulan sebelum masa tanam. 	

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa panjangnya alur distribusi pupuk bersubsidi menyebabkan rawan terjadinya penyimpangan. Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga menyebabkan tidak sesuainya 6 prinsip tepat. Beberapa kendala yang ditemukan melalui evaluasi 6 Tepat distribusi pupuk bersubsidi:

1. Sarana dan prasarana pendistribusian pupuk bersubsidi yang kurang memadai. Contohnya transportasi pendistribusian pupuk bersubsidi dari pabrik produsen di Palembang hingga ke Gudang Provinsi DIY yang kurang memadai.
2. KP3 dirasa kurang dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Adanya harga yang melebihi HET dan ketidaktepatan waktu ini menimbulkan prasangka bahwa KP3 kurang dalam melakukan pengawasan yang dikarenakan kurangnya anggaran pengawasan dan petugas pengawas.
3. Harga pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga pupuk bersubsidi yang melebihi HET ini dikarenakan adanya penambahan biaya atau ongkos kirim dari pengecer ke petani/kelompok tani. Namun pada Kelompok Tani Ngudi Rejeki

diketahui bahwa penambahan ongkos kirim ini juga untuk kas kelompok tani.

4. Penebusan pupuk bersubsidi yang ditunda-tunda atau bersamaan. Saat pupuk bersubsidi tersedia di kios/pengecer petani/kelompok tani cenderung menunda-nunda dalam melakukan penebusan dengan alasan masa tanam masih agak lama. Begitu juga dengan pengecer/kios yang mengambil pupuk bersubsidi dari distributor secara bersama-sama, sehingga distributor kekurangan stok pupuk bersubsidi.

5.2 SARAN

Berdasarkan kendala yang ditemukan pada distribusi pupuk bersubsidi, maka berikut saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Penggunaan pupuk non-subsidi dan pupuk kandang. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan permintaan kebutuhan kelompok tani.
2. Menghilangkan ataupun mengurangi ongkos kirim yang dilakukan oleh sopir dan Petani/Kelompok Tani sehingga harga pupuk bersubsidi yang didapatkan Petani/kelompok Tani tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
3. Mengganti kemasan pupuk bersubsidi dengan kemasan yang lebih awet sehingga tidak ditemukan kemasan yang rusak atau berlubang.

4. Sosialisasi kepada Petani/Kelompok Tani untuk menebus pupuk bersubsidi jauh-jauh hari agar tidak kehabisan saat akan masa tanam.
5. Pengecekan rutin Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk kemasan rusak, harga pupuk bersubsidi dan ketersediaan pupuk bersubsidi di tiap lini terutama pengecer demi tercapainya prinsip 6 tepat.
6. Pengecekan kondisi transportasi yang digunakan untuk mengangkut pupuk bersubsidi dari produsen hingga pengecer, sehingga kendala-kendala dalam transportasi pupuk bersubsidi dapat dicegah.
7. Pendampingan dari Dinas pertanian kepada Petani/Kelompok Tani untuk membuat pupuk organik olahan sendiri. Sehingga dapat menutup kekurangan pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akbar dan Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kotler, Philip. 2007. *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan, Pengendalian*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Munawar, D. 2013. *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan.
- Nazir, Habib dan Hasanudin Muhammad. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi Perbankan Syariah, Cetakan 1*. Bandung: Kaki Langit.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudjono, Spudnik. 2011. *Sistem Distribusi Berbasis Relationship*. Jakarta: Direktorat Jendral Pertanian.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE

Winardi. 1989. *Strategi Pemasaran*. Bandung: Mandar Maju

Sumber Website:

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3905418/jumlah-penduduk-terus-bertambah-bagaimana-ketahanan-pangan-ri> diakses 01 April 2018

Peraturan-peraturan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

LAMPIRAN

Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian pada tahun anggaran 2018

JENIS PUPUK	ALOKASI (TON)
UREA	4,100,100
SP 36	850,000
ZA	1,050,000
NPK	2,550,000
ORGANIK	1,000,000
JUMLAH	9,550,000

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

JENIS PUPUK	HARGA	
	(Rp/Kg)	(Rp/ZAK)
UREA	1.800	90.000 (@50 Kg)
SP36	2.000	100.000 (@50 Kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 Kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000 (@40 Kg)

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

Alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Gunungkidul 2018

NO	KECAMATAN	UREA	NPK	SP-36	ZA	ORGANIK
1.	PANGGANG	444,00	145,00	18,00	23,00	2,00
2.	PURWOSARI	319,00	138,00	33,00	40,00	38,00
3.	PALIYAN	626,00	311,00	22,00	27,00	13,00
4.	SAPTOSARI	731,00	182,00	2,00	2,00	2,00
5.	TEPUS	718,00	146,00	27,00	1,00	3,00
6.	TANJUNGSARI	608,00	151,00	14,00	7,00	13,00
7.	RONGKOP	618,00	170,00	57,00	-	2,00
8.	GIRISUBO	567,00	153,00	71,00	4,00	3,00
9.	SEMANU	756,00	494,00	61,00	35,00	41,00
10.	PONJONG	1.016,00	576,00	94,00	51,00	25,00
11.	KARANGMOJO	650,00	483,00	79,00	170,00	294,00
12.	WONOSARI	636,00	554,00	89,00	154,00	23,00
13.	PLAYEN	647,00	442,00	23,00	53,00	262,00
14.	PATUK	431,00	387,00	32,00	157,00	63,00
15.	GEDANGSARI	600,00	265,00	61,00	88,00	15,00
16.	NGLIPAR	725,00	334,00	72,00	67,00	160,00
17.	NGAWEN	808,00	415,00	55,00	131,00	62,00
18.	SEMIN	1.030,00	419,00	97,00	199,00	72,00
JUMLAH		11.930,00	5.765,00	907,00	1.209,00	1.093,00

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

JENIS PUPUK	HARGA PRODUSEN (kg) ke DISTRIBUTOR	HARGA DISTRIBUTOR (kg) ke PENGE CER
UREA	Rp 1.627,2729	Rp 1.731,818
ZA	Rp 1.222,818	Rp 1.331,818
SP-36	Rp 1.822,818	Rp 1.931,818
NPK	Rp 2.122,818	Rp 2.231,818
ORGANIK	Rp 322,818	Rp 431,818

Sumber: diolah

JENIS PUPUK	HARGA DISTRIBUTOR (kg) ke PENGE CER	HARGA PENGE CER (kg) ke PETANI
UREA	Rp 1.731,818	Rp 1.800,-
NPK	Rp 1.331,818	Rp 1.400,-
ZA	Rp 1.931,818	Rp 2.000,-
SP36	Rp 2.231,818	Rp 2.300,-
ORGANIK	Rp 431,818	Rp 500,-

Sumber: diolah